
**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**



K O T A B E K A S I

**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK KOTA
BEKASI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya. Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024, dimana target dan indikator sasaran yang telah disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2024.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi, 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI


NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19740708 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	10
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi	30
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	63
BAB III	67
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI	67
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol	72
3.3 Program dan Kegiatan	73
BAB IV	85
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023	85
BAB V	93
PENUTUP	93
A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	93
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	95
C. Rencana Tindak Lanjut	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021-2022.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2022.....	34
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja SKPD pada Tahun 2021-2022.....	35
Tabel 2.4	Rekapitulasi Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi.....	42
Tabel 2.5	Rekapitulasi Permasalahan Keagamaan di Kota Bekasi.....	42
Tabel 2.6	Rekapitulas Permasalahan Kerawanan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2022.....	46
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	49
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	63
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan.....	70
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renja PD dengan RKPD.....	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov.....	5
Gambar 2.1	Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....	39
Gambar 2.2	Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah daerah wajib untuk menyusun rencana strategis teknokratis daerah sebagai pedoman untuk mengisi berakhirnya rencana strategis kepala daerah terpilih. Dengan berakhirnya periode masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk tahun 2018-2023, maka berakhir pula Renstra Kesbangpol Kota Bekasi yang merujuk kepada Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah menyusun Renstra Teknokratik pada tahun 2024-2026 sebagai bentuk antisipasi kekosongan arah pembangunan.

Renstra Teknokratik perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2024. Dokumen

Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun pertama periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2024, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Renja sangat memperhatikan program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran arah kebijakan pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 yang termuat ke dalam 5 (lima) tujuan, diantaranya :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota

Dari ke-5 tujuan tersebut, jika dilihat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan tujuan ke-1 dan ke-4, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk tujuan-tujuan pembangunan daerah. Tujuan yang dimaksud adalah “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang**

Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel” dan “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”.

Berdasarkan tujuan dari arah kebijakan pembangunan tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan roda pemerintahan pada Badan Kesbangpol. Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

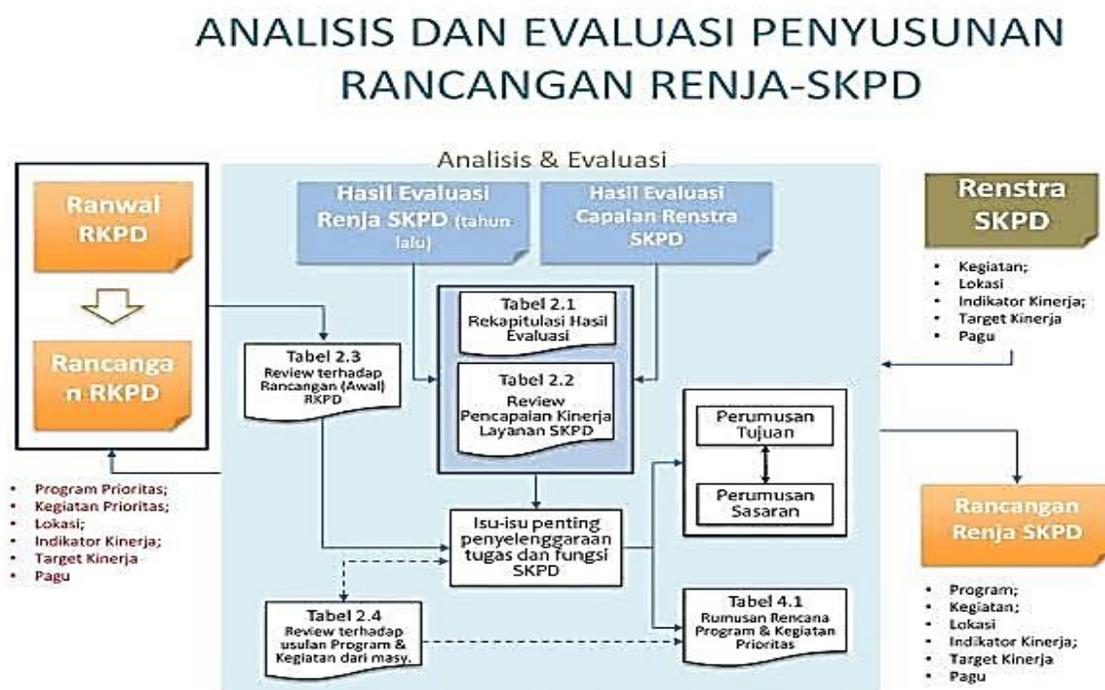
Dalam melakukan penyusunan Renja, Badan Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki kompetensi di dalam mendukung penyusunan renja ini. Proses penyusunan ini Renja ini dimulai dengan mengajukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada tahun 2024 kepada Bappelitbangda Kota Bekasi sebagai operator utama perencanaan pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang diajukan oleh Badan Kesbangpol merujuk kepada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, Renstra Badan Kesbangpol 2018-2023, usulan-usulan kecamatan yang diaring melalui Musrenbang tingkat kecamatan serta masukan dari Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah.

Forum Perencanaan Tingkat Perangkat Daerah merupakan forum pembahasan perencanaan Badan Kesbangpol tertinggi. Peserta forum ini terdiri dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol, organisasi/komunitas yang bekerjasama dengan Badan Kesbangpol hingga kecamatan yang memiliki keselarasan kegiatan dengan Badan Kesbangpol.

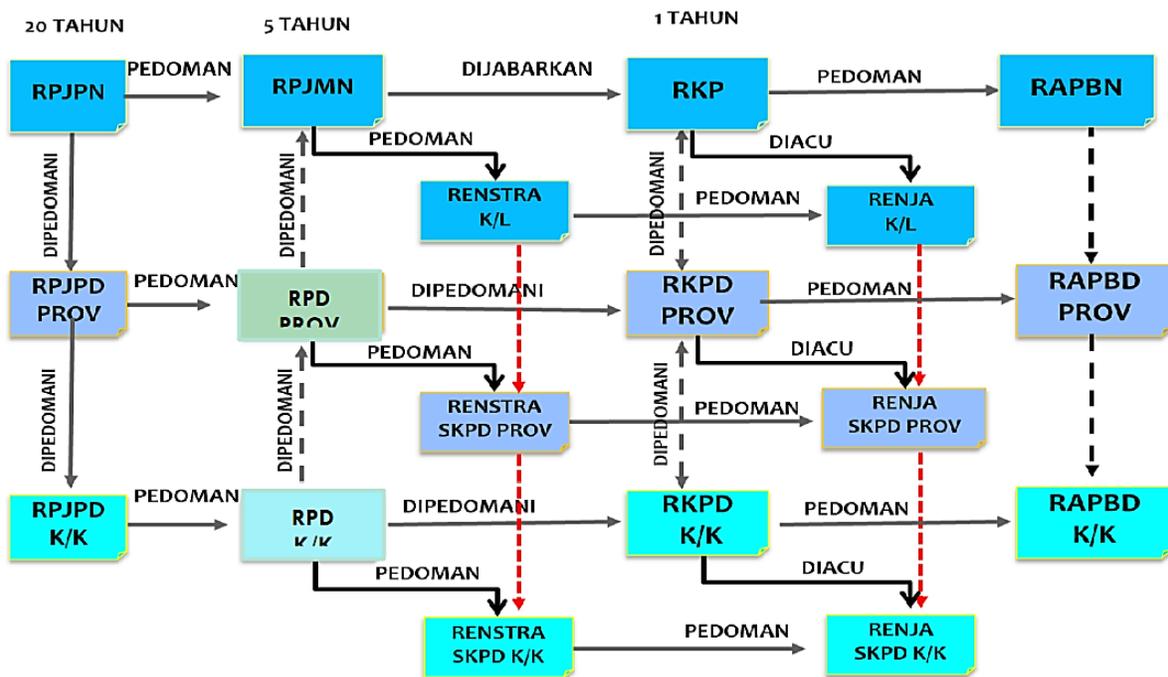
Forum ini kemudian melakukan finalisasi penyusunan program dan kegiatan prioritas tingkat Perangkat Daerah. Hasil dari forum ini menjadi usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2024 Badan Kesbangpol tersebut kemudian disatukan dengan usulan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah lain dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi untuk dibahas ke dalam Pra Musrenbang Kota Bekasi. Dalam forum ini terjadi proses telaah analitik mengenai daftar program dan kegiatan RKPD untuk disempurnakan. RKPD yang telah disempurnakan tersebut kemudian dibawa ke dalam forum Musrenbang tingkat Kota Bekasi untuk disahkan dalam bentuk penandatanganan berita acara Musrenbang. Hasil dari Musrenbang tingkat Kota ini merupakan finalisasi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat melalui sinkronisasi Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov

Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pantau situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
- Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan operasional, terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah perubahan ketiga dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 SERI E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 129 Tahun 2021 Seri D);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang

penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b. Tujuan penyusunan Renja Tahun 2024 :

Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:

1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2024 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
2. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2024;
3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I adalah PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. BAB II adalah EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 2021. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;
3. BAB III adalah TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
4. BAB IV adalah RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V adalah PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2018-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bekasi pada dasarnya bermuara dari visi yang telah digariskan oleh Wali Kota terpilih. Visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan menjadi landasan konseptual di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik;
4. Persentase Ormas yang Berpreranan Aktif dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut. Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-1, yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**. Dalam mendukung misi tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan indikator sasaran Nilai AKIP Bakesbangpol dengan menargetkan perbaikan serta peningkatan kualitas mutu pelayanan perangkat daerah Bakesbangpol. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator sasaran kinerja tersebut adalah dengan **“Mengoptimalkan peningkatan Adminitrasi, SDM, Sarana dan Prasana, serta pelaporan kinerja”**. Pada tahun 2022, indikator ini menetapkan target **“BB”** dengan kategori *“Sangat Baik”* sebagai bentuk peningkatan Akuntabilitas pelayanan pada Bakesbangol Kota Bekasi.

2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

Salah satu misi pembangunan Walikota yang dibebankan ke dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-5, yaitu **“Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman”**. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebagaimana yang tertera di dalam sub judul. Salah satu upaya untuk menekan kasus Perselisihan SARA adalah dengan menurunkan jumlah gangguan Kantrantibmas dan Pelanggaran Ketertiban di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator sasaran tersebut adalah dengan **“Peningkatan kesatuan bangsa dengan pemantapan ideologi nasional melalui Pembauran Kebangsaan, Peningkatan Kewaspadaan Nasional dengan pencegahan serta memfasilitasi penanganan Konflik Sosial dan Pemantapan Kerukunan Masyarakat dalam menjaga ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi”**. Pada tahun 2022, indikator ini menetapkan target *“Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan”* yang terjadi di Kota Bekasi. Indikator ini menargetkan bahwa kejadian permasalahan perselisihan SARA yang terjadi di Kota Bekasi harus diselesaikan 100%.

3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai juga perlu dikembangkan dari sisi peningkatan kondusifitas di

masyarakat. Terkait hal tersebut Pendidikan Politik ini sangat diperlukan demi terciptanya iklim masyarakat yang kondusif, santun dan beretika dalam mendukung stabilitas dan keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan sosial di Kota Bekasi. Dengan adanya Pendidikan Politik, masyarakat Kota Bekasi akan mengalami peningkatan kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik. Kesadaran dan kesantunan di dalam berpolitik dari masyarakat akan berimplikasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan warga terkait segala tahapan kebijakan dan keputusan dalam ranah politik. Indikator ini menargetkan situasi masyarakat Kota Bekasi yang aktif dalam memberikan aspirasi serta berdemokrasi melalui penyampaian pendapat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi di Kota Bekasi.

4. Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah

Kerukunan masyarakat yang terjalin baik dan kondusif sampai saat ini diimbangi dengan pembangunan daerah dalam seluruh aspek kehidupan dari berbagai bidang tidak terlepas dari peranan suatu kelompok/perkumpulan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai latar belakang. Kota Bekasi sebagai daerah dengan perkembangan yang cepat sangat membutuhkan pendampingan peran serta dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu bentuk upaya dalam mencapai indikator sasaran tersebut melalui fasilitasi peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah melalui berbagai bidang diantaranya Pendidikan, Keagamaan, Kebudayaan, Sosial Kemasyarakatan, Sosial Kontrol dan lain hal. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang setiap tahun bertambah banyak dapat dijadikan dorongan percepatan pembangunan daerah disisi lain pemerintah memberikan pembinaan untuk menghindari gesekan antar kelompok yang bermotif demi mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing kelompok dan tidak untuk masyarakat luas.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditunjang dengan Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah, dengan ruang lingkup kerjanya sebagai berikut :

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Belanja Langsung Penunjang Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp. 10.846.646.330 dan sampai dengan Bulan Desember 2022 penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp 9.869.654.370 (90,99%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 95%. Adapun perincian Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

✓ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sebagian besar realisasi kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Sampai dengan bulan Desember 2022, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat perubahan pagu anggaran (ABT) yang berimplikasi kepada perubahan target capaian indikator pada setiap kegiatan dan sub kegiatan Belanja Langsung Urusan Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang dianggarkan sebesar Rp. 13.370.902.305,- terealisasi sebesar Rp. 9.787.022.577,- (73,2%) dan untuk realisasi kinerja mencapai 87.6%. Adapun perincian Belanja Langsung Urusan (BLU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- ✓ **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 17%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- ✓ **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 76%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

✓ **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 98%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

✓ **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 91%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

✓ **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini sampai dengan Bulan November Tahun 2022 mencapai realisasi kinerja sebesar 91,66% dan realisasi anggaran sebesar 80,97%. Pada program ini, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sebagian dari beberapa kegiatan, terdapat yang tidak terlaksana dikarenakan adanya beberapa aturan yang mempengaruhi pencapaian beberapa target yang telah ditetapkan, hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga memberikan dampak kepada kurang optimalnya pencapaian target yang telah direncanakan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2021-2022 dan Pencapaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Rencana Strategis Perubahan Badan Kesbangpol Tahun 2018-2023)

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	
8.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	
8.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0 Laporan	2 Laporan	66,67%	
8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	1.806 Orang/Bulan	-	602 Orang/Bulan	544 Orang/Bulan	90,37%	0	544 Orang/Bulan	48,36%	
		Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN	1.548 Orang/Bulan	516 Orang/Bulan	516 Orang/Bulan	517 Orang/Bulan			1078 Orang/Bulan		
8.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	0 Laporan	2 Laporan	66,67%	
8.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	
8.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	540 Stell	180 Stell	0 Stell	0 Stell	0%	0	180 Stell	33,33%	
8.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai	36 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%	
8.01.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta	55 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%	
8.01.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta	55 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	
8.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	19516 Unit	2972 Unit	8272nit	8272nit	100%	0	11244 Unit	57,61%	
8.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	80000 Lembar	80000 Lembar	80000 Lembar	80000 Lembar	100%	0	16000 Lembar	66,67%	
8.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan/ peraturan perundang- undangan	16000 Buku/exem plar	5000 Buku/exempla r	5500 Buku/exemp lar	5500 Buku/exemp lar	100%	0	10500 Buku/exempl ar	65,62%	
8.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah/perjalanan dinas	497 Kali	80 Kali	117 Kali	107 Kali	100%	0	181 Kali	37,62%	
8.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	1250 Box	900 Box	100 Box	100 Box	100%	0	1000 Box	80%	
8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	
8.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	384 Orang/Bul an	120 orang/bulan	144 orang/bulan	120 orang/bulan	100%	0	240 orang/bulan	62,5%	
8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	300%	100	100%	100%	100%	0%	200%	66,67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
8.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	66 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	0	44 Jenis	66,67%	
8.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan	75 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	0	50 Unit	66,67%	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50%	-	15%	15%	100%	0	15%	30%	
8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100%	0%	23,19%	23,19%	100%	0	23,19%	23,19%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.02.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pembinaan bela negara	-	-	60 Orang	60 Orang	100%	0	60 Orang	100%	
8.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pemantapan ideologi bangsa dan nilai- nilai pancasila	70 Orang	0 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	0	70 Orang	100%	
		Jumlah peserta pembinaan bela negara	460 Orang	100 Orang	85 Orang	40 Orang	100%	0	100 Orang	21,73%	
		Jumlah Peserta Wawasan Kebangsaan	3050 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	
		Jumlah Peserta Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan	120 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	690 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	15%	5%	5%	5%	100%	0	5%	66,66%	
8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah penyelenggaraan pendidikan politik	2840 Orang	0 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	0	600 Orang	21,12%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
8.01.03.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik	2840 Orang	0 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	0	600 Orang	21,12%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah										
8.01.03.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapat bantuan keuangan	16 Partai Politik	8 Partai Politik	8 Partai Politik	8 Partai Politik	100%	0 Partai Politik	16 Partai Politik	100%	
		Jumlah lembaga yang mendapat bantuan dana hibah	3 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga			2 Lembaga	66,67%	
8.01.03.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	300%	-	100%	100%	100%	0	100%	33,33%	
8.01.04.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	30 Ormas	11 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	100%	0 Ormas	17 Ormas	56,6%	
8.01.04.2.0 1.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	0 Dokuem	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
8.01.04.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	17 Ormas	11 Ormas	6 Ormas	6 Ormas	100%	0 Ormas	17 Ormas	56,6%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	yang mendapat Bantuan Dana Hibah									
8.01.04.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017	540 Orang	30	180 Orang	180 Orang	100%	0	210 Orang	38,8%	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0,18%	0,15	0,17%	0,17%	0,17%	0	0,17%	0,17%	
8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300%	-	100%	100%	100%	0	100%	33,33%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.05.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional	3 Kali	0 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	0	1 Kali	33,33%	
		Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba	450 Orang	0 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	0	150 Orang	33,33%	
		Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2450 Orang	0 Orang	1200 Orang	1200 Orang	100%	0	1200 Orang	48,97%	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	300%	100%	100%	100%	100%	0	100%	66,66%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	300%	100%	100%	100%	100%	0	100%	66,66%	
8.01.06.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%	
8.01.06.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah	24 Dokumen	12 Dokuem	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	0	24 Dokumen	100%	
		Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Pendataan Orang Asing	3 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	0	3 Kegiatan	100%	

Kode	UrusanBidang Urusan Pemerintah/Daerah dan /Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capain Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Ke giatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Orang Asing	120 Orang	0 Orang	120 Orang	108 Orang	90%	0	108 Orang	90%	
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	0	0 Laporan	0%	

(Sumber : Renstra Perubahan Bakesbangpol Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Badan Kesbangpol 2021-2023)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja program dan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol adalah dengan melakukan efektivitas dan efisien dalam memaksimalkan pagu anggaran yang ada pada setiap Program dan Kegiatan, hal itu dilakukan agar tercapainya target kinerja yang ditetapkan Badan Kesbangpol.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Laporan Keberadaan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUMah Ibadah. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- 3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- 7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
- 8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kegiatan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
- 9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang

Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

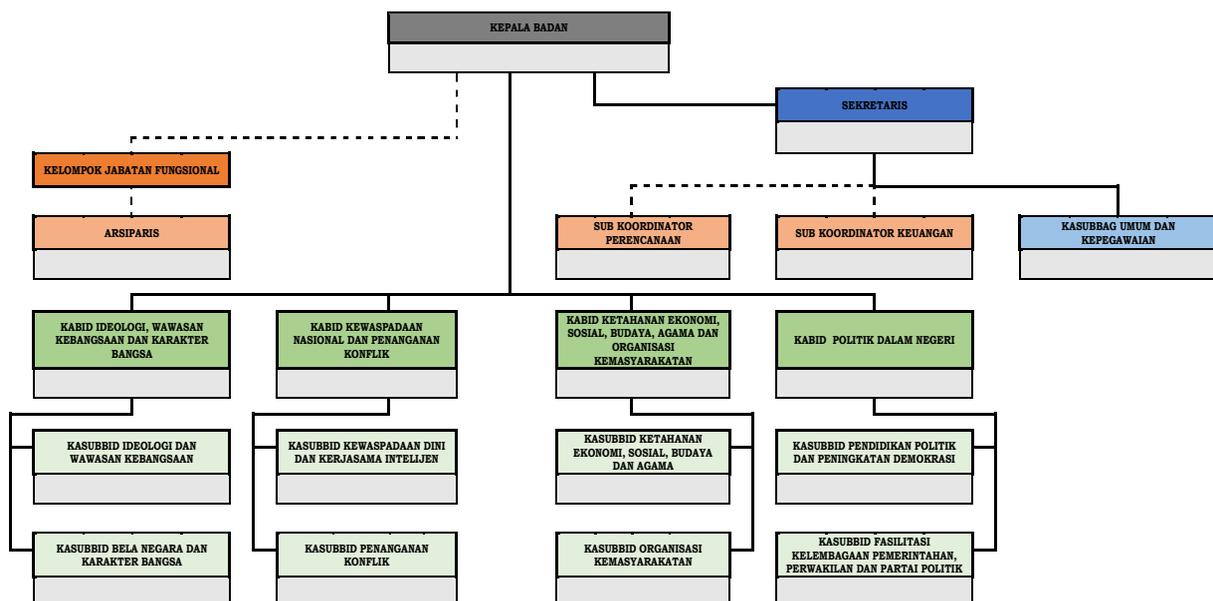
- 10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitiasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
- 11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi.
- 13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2022 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

- 1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat Administrator, 9 (sembilan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2022, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 50 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi
 Menurut Esselonoring (Data Oktober 2022)

NO	Esselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1	II	-	-	1	-	1	
2	III	1	-	3	1	5	
3	IV	6	3	-	-	9	
	Pangkat	ASN		TKK			
1	Jafung	-	3	-	-	3	
2	Staff	17	5	5	5	32	
Jumlah Total Esselon						50	

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2021-2022
(Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023)

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Nilai AKIP Kesbangpol (Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat)	-	-	-	-	Bb	Bb	Bb	-	-	Bb	Bb	Bb	Penyesuaian indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023
2	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan - Rumus : $\frac{\text{Jml. konflik SARA yang diselesaikan (n)}}{\text{Jml. konflik SARA yang dilaporkan (n)}} \times 100$	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100	100%	100%	
3.	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik - Rumus : $= \frac{\text{Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol (n)}}{\text{Jumlah total Pembinaan Politik (n)}} \times 100\%$	-	-	-	-	54,37%	58,56%	88,56%	-	-	54,37%	58,56%	88,56%	
4.	Persentase Ormas yang Berpreranan Aktif dalam Pembangunan Daerah - Rumus : $= \frac{\text{Jml. Ormas Tertib Administrasi (n)}}{\text{Jml. Total Ormas Tercatat di Kesbangpol Kota Bekasi}} \times 100\%$	-	-	-	-	64,2%	77,1%	90%	-	-	64,2%	77,1%	90%	

(Sumber : Rencana Strategis Perubahan Bakesbangpol Tahun 2021-2023 dan IKU Bakesbangpol)

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi merupakan lembaga teknis daerah Kota Bekasi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesbangpol menghadapi berbagai isu/permasalahan sosial di masyarakat. Isu-isu di dalam penyelenggaraan tugas yang dihadapi Badan Kesbangpol, antara lain:

1) Isu Kerukunan Umat Beragama

Terdapat beberapa permasalahan di dalam penanganan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Rumusan isu kerukunan umat beragama, antara lain:

- **Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata-cara pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi.**

Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan. Kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik, terutama konflik agama. Salah satu permasalahan konflik terjadi karena kurangnya pemahaman tata cara pendirian rumah ibadah yang diatur melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat serta Peraturan Walikota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013. Adapun data

rumah ibadah di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Data Rumah Ibadah di Kota Bekasi

NO	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH	KET
1	Masjid	1147	
2	Musholla	1741	
3	Gereja Prostestan	82	
4	Gereja Katholik	8	
5	Vihara	11	
6	Pura	1	
7	Prajapati	1	
8	Klenteng	1	
9	Pasewakan	3	

(Sumber : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat)

Dari data rumah ibadah tersebut di atas, Kota Bekasi memiliki komposisi penduduk yang beragam, hal ini tentunya bisa menimbulkan konflik berupa gesekan antar pemeluk Agama. Banyak konflik antar umat beragama di Kota Bekasi di latar belakang oleh permasalahan pembangunan rumah ibadah. Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya konflik pembangunan rumah ibadah adalah karena belum mengetahuinya masyarakat perihal regulasi yang mengatur dalam pembangunan rumah ibadah. Berikut beberapa kasus konflik agama yang terjadi di Kota Bekasi, diantaranya :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Permasalahan Keagamaan di Kota Bekasi

NO	NAMA RUMAH IBADAH	TAHUN TERJADINYA KONFLIK	PERMASALAHAN KONFLIK
1	Gereja Galilea	Februari 2010	Penolakan warga masyarakat dan ormas islam terhadap pembangunan Gereja Galilea di Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan
2	Gereja Huria Batak Protestan	Agustus 2010	Bentrok antar Ormas Islam dengan jemaat Gereja Huria Batak Protestan di Pondok Indah Timur
3	Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI), Gereja	Mei 2012	Penyegelan rumah ibadah yang berada di Kampung Mangseng, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara karena tidak

NO	NAMA RUMAH IBADAH	TAHUN TERJADINYA KONFLIK	PERMASALAHAN KONFLIK
	Pantekosta, dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)		pernah mengajukan izin sesuai dengan prosedur kepada pemerintah daerah
4	Masjid Ahmadiyah	Februari 2013	Penutupan tempat ibadah Islam Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah di Jalan Terusan Pangrango Nomor 44, Jatibenting Baru, Pondok Gede Bekasi
5	Gereja St. Stanislaus Kosta	Maret 2014	Penolakan warga masyarakat dengan melakukan aksi pengepungan Gereja St. Stanislaus Kosta oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) untuk menuntut penghentian terhadap pembangunan di kalamiring, Jatisampurna Bekasi.
6	Gereja Santa Clara	Agustus 2015	Pelanggaran perizinan rumah ibadah Gereja Santa Clara yang beralamt di Kecamatan Bekasi Utara.
		Maret 2016	Penolakan warga masyarakat dari berbagai ormas islam dengan melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara.

(Sumber : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan)

Sampai saat ini Badan kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam fasilitasi segala bentuk permasalahan konflik keagamaan telah giat melakukan langkah-langkah strategis dalam menajemen dan resolusi konflik antar umat beragama yang terjadi melalui 2 cara yaitu pencegahan dan penyelesaian. Cara pencegahan adalah dengan membentuk dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai lembaga yang akan membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat bergama di masyarakat, sedangkan cara penyelesaiannya yaitu melakukan pendekatan persuasif diantara kedua belah pihak yang beselisih menggunakan cara mediasi untuk menghentikan konflik yang berlangsung dan melakukan akomodasi bagi pihak-pihak yang sedang bertikai. Badan Kesbangpol juga memberikan kesempatan kepada 2 (dua) pihak yang berselisih untuk beraudensi dengan unsur muspida. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol

dengan melakukan sosialisasi Peraturan Tata-Cara Pendirian Rumah Ibadah secara masif. Badan Kesbangpol juga melakukan verifikasi dan survei terkait berkas pengajuan pendirian rumah ibadah. Data empiris lapangan menunjukkan bahwa kontestasi antar kelompok agama yang berbeda-beda (*heterogen*) di Kota Bekasi dapat memicu terjadinya konflik dan di sisi lain dapat menjadi akomodasi atau kerjasama guna membangun perdamaian di atas segala perbedaan yang ada. Perdamaian dalam relasi antar kelompok beragama terbentuk karena kesadaran elit dan masyarakat berbagai agama untuk hidup berdampingan dan bekerjasama. Kesadaran dan sikap tersebut dipengaruhi faktor inklusivitas dalam beragama dan nilai-nilai budaya yang mampu menghidupi toleransi antar kelompok agama yang berbeda. Kontestasi antar kelompok agama berbeda sebagaimana yang terjadi di Kota Bekasi meskipun telah bisa diredam, namun hal itu bisa muncul kembali sewaktu-waktu di masa datang jika tidak diantisipasi lebih dini. Maka sangat diperlukan ruang-ruang komunikasi dan interaksi antar umat beragama yang berbeda untuk menjembatani jika ada perbedaan kepentingan dan juga munculnya isu yang bisa memecah integrasi keduanya. Dengan demikian, dialog-dialog antar lintas agama dan berbagai aliran dan pemahaman dalam internal agama itu sendiri perlu lebih diintensifkan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak konflik yang bisa muncul kapan saja. Menghidupkan kembali forum-forum di masyarakat yang menjembatani dialog antar kelompok berbeda sangat memberikan efek positif dengan dilakukan hal tersebut berimplikasi menyebarkan pemahaman saling menghormati dan menerima perbedaan agama demi menciptakan dan melanggengkan hubungan harmonis antar umat beragama khususnya yang berada di Kota Bekasi. setiap agama memiliki dasar pokok yang mendorong terwujudnya hidup toleransi dan membina kerukunan di antara intern dan antar umat beragama. Hal ini dapat direalisasikan apabila konsep toleransi dan kerukunan tersebut dilakukan oleh para tokoh agama maupun pemeluk masing-masing agama yang dikuatkan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya kerukunan hidup bersama tersebut. Selain itu, etika juga menjadi salah satu

instrumen penting untuk menumbuhkan kehidupan yang penuh kebajikan, termasuk kehidupan yang penuh toleran antar penganut agama.

- **Berkembangnya Paham Radikal Keagamaan.**

Pada tahun sebelumnya, kasus yang muncul ke permukaan adalah berkembangnya pemahaman radikal dalam beragama. Pemahaman ini berkembang menjadi sebuah gerakan-gerakan yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol bersama *stakeholder* tetap mewaspadai penyebaran paham Radikal di masyarakat, terlebih dengan kembalinya para *combatan* dari medan *Jihad* di Suriah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Nasional, diperkirakan jumlah *combatan* yang kembali dari medan *Jihad* hampir 200 orang. Sebagian besar dari *combatan* tersebut berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol bersama unsur terkait giat melakukan pendekatan dan penggalangan. Badan Kesbangpol bersama Kominda Kota Bekasi juga melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan penyebaran paham radikal yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi bersama MUI, Kantor Kemenag, FKUB dan FPK terus melakukan pendampingan kepada pengurus DKM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam hal pencegahan paham radikal di wilayah. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesbangpol adalah melakukan tindakan preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah dengan mengadakan dialog mendalam diantara pemuka agama. Badan Kesbangpol juga memperkuat peran dan fungsi dari forum bentukan pemerintah yang memiliki hubungan kerja di dalam kerukunan umat beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara umum, kasus kerukunan umat beragama yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena faktor pendirian rumah ibadah, penistaan ajaran agama dari kelompok tertentu dan perselisihan yang terjadi di internal pengurus rumah ibadah.

2) Isu Keamanan dan Ketertiban

Masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi disebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Rumusan isu keamanan dan ketertiban antara lain:

TABEL 2.6

Rekapitulasi Permasalahan Kerawanan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2022

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
1.	Kecamatan Bekasi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penataan lahan parkir dan pkl sehingga sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu; • Permasalahan penyakit masyarakat (prostitusi dibalut dengan kegiatan kafe).
2.	Kecamatan Bekasi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian rumah ibadah (Gereja) Santa Clara terdapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat. Penolakan dimotori oleh Ponpes An-Nur dan Ponpes At-Taqwa; • Perkembangan faham radikal di Masjid Al-Hikmah Duren Jaya.
3.	Kecamatan Bekasi Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan penataan PKL di Jalan M. Yamin; • Ditemukannya tempat transit teroris; • Maraknya aktifitas Organisasi Masyarakat di luar koridor hukum.
4.	Kecamatan Bekasi Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Terindikasi aktifitas aliran syiah di pemukiman warga; • Aksi penolakan masyarakat terhadap pengembang Kota Bintang terkait data administrasi perijinan • Penertiban dan pembongkaran PKL; • Penolakan Ormas terhadap penertiban lahan kosong
5.	Kecamatan Medan Satria	<ul style="list-style-type: none"> • Monopoli lahan parkir pasar family yang dilakukan oleh oknum Ormas; • Ditemukannya tempat transit terduga teroris.
6.	Kecamatan Rawalumbu	<ul style="list-style-type: none"> • Terindikasi aktifitas aliran syiah di pemukiman warga; • Permasalahan izin rumah ibadah HKBP Rawalumbu; • Perselisihan/Bentrok Kelompok Ormas (Ormas Pemuda Batak Bersatu dengan Gerakan Muslim Pembela Aqidah) yang melatarbelakangi kesalahpahaman antar anggota ormas yang berada di TKP (Utang piutang).
7.	Kecamatan Jatiasih	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan peredaran narkoba (ditemukan tempat transit ganja); • Ditemukan lokasi home industri narkoba jenis sabu. • Konflik hak administrasi ahli waris tanah Hankam Jatikarya kepada pihak Jasa Marga

No.	Wilayah Titik Rawan	Permasalahan
1	2	3
8.	Kecamatan Pondok Gede	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Al-Misbah Pondok Gede; • Permasalahan PKL di pasar Pondok Gede.
9.	Kecamatan Jatisampurna	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan/Bentrok Kelompok Ormas yang melatarbelakngi egosentrisme dengan penduduk setempat; • Penolakan warga terhadap jalan tol di jati karya; • Permasalahan kafe remang-remang.
10	Kecamatan Pondok Melati	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan tenaga kerja asing ilegal.
11.	Kecamatan Bantargebang	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan ini melibatkan masyarakat di sekitar tempat pengelolaan sampah bantar gebang.
12.	Kecamatan Mustika Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan tempat transit teroris. • Permasalahan penertiban PKL di Mustikajaya.

(Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik)

Untuk menyikapi hal tersebut, Badan Kesbangpol memaksimalkan pemantauan wilayah terkait deteksi dini terhadap sumbu-sumbu yang dapat memicu kerawanan sosial di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol melakukan giat deteksi dini dan pendidikan Intelegen Daerah kepada pengurus forum bentukan pemerintah di bidang kewaspadaan serta jaring intelegen di tingkat Kelurahan.

Oleh karenanya, penguatan fungsi dan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) menjadi penting. Keberadaan Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bekasi diharapkan dapat atau mampu mencari, mengumpulkan dan menganalisa informasi di lingkungan/wilayah kerja masing-masing dalam menunjang stabilitas keamanan dan menekan tingkat kerawanan sosial di Kota Bekasi. Diharapkan pula tanggungjawab aparat kelurahan, kecamatan dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagai jaring Deteksi Dini.

Berdasarkan analisa dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan skala prioritas (pembobotan) Badan Kesbangpol dapat ditekankan kepada :

1) **Program**

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memiliki posisi

penting dalam menyelesaikan isu-isu kritis urusan kesatuan bangsa dan politik. Ketiga program tersebut menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan yang terfokus kepada pembangunan wawasan kebangsaan, pencegahan dan penanganan konflik serta menjaga kerukunan masyarakat di Kota Bekasi.

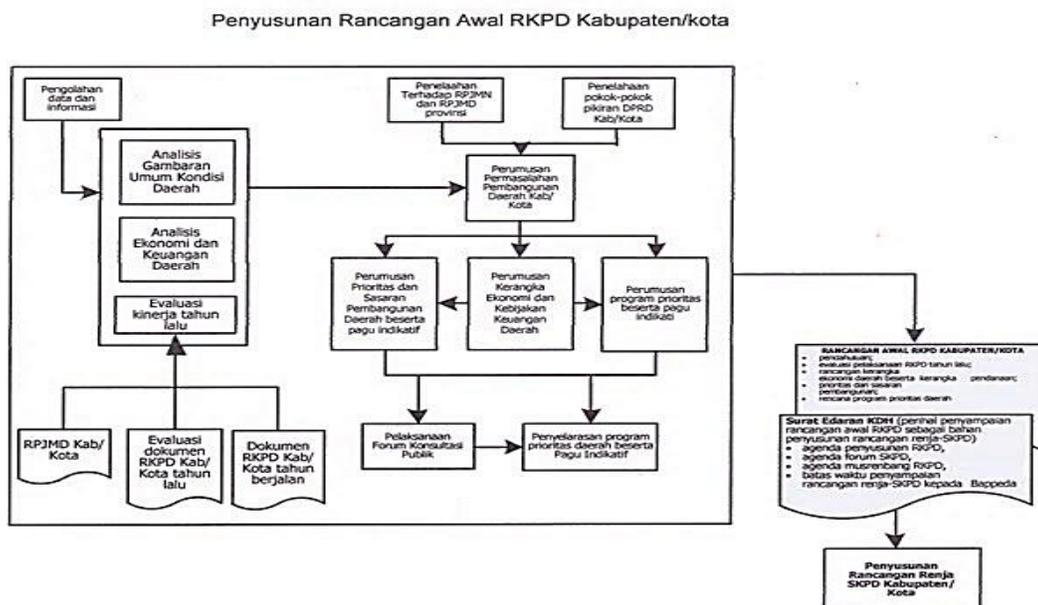
2) Kegiatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya termasuk ke dalam skala prioritas Badan Kesbangpol untuk menyelesaikan isu-isu strategis seperti yang telah dijelaskan di atas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Berikut kami sampaikan rancangan awal RKPD terkait usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol hasil penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD



Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	11,164,671,740	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	11,509,671,740	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	40,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17,000,000	Pengurangann pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,904,620,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,902,602,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1134 Orang/Bulan	8,894,620,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/bulan	8,894,620,000	Penyesuaian terhadap kondisi eksisting jumlah pegawai Bakesbangpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	8,000,000	Pengurangann pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	330,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	330,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Orang	150,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52 Orang	150,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	900,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	875,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	300,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	220,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	220,000,000	Sub kegiatan ini hasil pengajuan saat desk dan prioritas terkait kurangnya sarana dan prasarana pada Bakesbangpol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	551.396.330	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	550,051,740	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550,051,740	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550,051,740	Adanya penyesuaian pagu anggaran, disesuaikan dengan jenjang pendidikan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	440,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	615,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	340,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	340,000,000	- Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara berjumlah 9 Unit - Jumlah motor yang terpelihara 13 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	100,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200,000,000	Sub kegiatan ini hasil pengajuan saat desk dan prioritas terkait kurangnya sarana dan prasarana pada Bakesbangpol
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2,290,812,860	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	2,290,812,860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Bekasi					Kota Bekasi				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	690 Orang	2,290,812,860	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	690 Orang	2,290,812,860	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	690 Orang	2,290,812,860	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat dan Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	690 Orang	2,290,812,860	
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	123,350,734,000	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100 %	118,822,616,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Dokumen	123,350,734,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Dokumen	118,822,616,000	
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2400 Orang				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2400 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	121,816,578,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	122,288,460,000	Memfasilitasi bantuan Keuangan Partai Politik Kota Bekasi, Hibah ke KPUD Kota Bekasi, Polresta Bekasi Kota dan Kodim 0507/Bekasi (Badan Kesbangpol memfasilitasi Hibah tersebut, sebagaimana akan dilaksanakannya pesta demokrasi serentak pada tahun 2024), dan akan menyesuaikan Surat edaran Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2400 Orang	1,500,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2400 Orang	1,500,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	34,156,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	34,156,000	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	9,400,000,000	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8,595,411,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Organisasi Kemasyarakatan					Organisasi Kemasyarakatan					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32 Dokumen	9,400,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41 Dokumen	8,595,411,700	
			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 peserta				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 peserta		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	32 Dokumen	9,000,000,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	7,850,411,700	Sub kegiatan ini untuk memfasilitasi Hibah ke Ormas/LSM
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	250 peserta	400,000,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	300 peserta	750,000,000	Berdasarkan hasil desk terdapat penampahan pagu anggaran pada sub kegiatan ini dan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada Ormas / LSM di Kota Bekasi
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1,000,000,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1,000,000,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1700 Orang	1,000,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1700 Orang	1,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1700 Orang	1,000,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1700 Orang	1,000,000,000	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	2,375,000,000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	2,537,400,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	300 Orang	2,375,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	400 Orang	2,537,400,000	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bakesbangpol	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	350,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	850,000,000	Adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan ini, karena merupakan salah satu kegiatan prioritas Bakesbangpol dalam menjaga kantratribmas di tahun politik yang akan diselenggarakan pada tahun 2024
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	650,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537,200,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,375,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,155,000,000	Pengurangan pagu sub kegiatan berdasarkan hasil desk

(Sumber : Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan *stakeholder* di dalam merumuskan perencanaan. Dari *stakeholder* tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjaring aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjaringan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah :

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.290.812.860	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.290.812.860	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jawa Barat, Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.290.812.860	
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	80.942.031.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80.942.031.000	
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	79.407.875.000	- Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi - Hibah KUPD Kota Bekasi Tahun 2024 (Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.500.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.156.000	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.595.411.700	
			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	7.850.411.700	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (MUI, FKUB, FPK, FKDM dan Organisasi Lainnya)
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	745.000.000	
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.000.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000	
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	2.537.400.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.537.400.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	845.200.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.200.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.955.000.000	

(Sumber : Dokumen Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2024-2026)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 merupakan rencana pembangunan jangka menengah keempat dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-4 tahun 2020-2025 adalah kelanjutan RPJMN ketiga Tahun 2014-2019, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: *“Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”*. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2025 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 9 (sembilan) Misi yang diemban dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan 9 (sembilan) misi di atas, Pemerintah Pusat menetapkan agenda untuk mendukung misi tersebut. Agenda tersebut antara lain:

- Agenda I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

- berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
- Agenda II : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
- Agenda III : Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah;
- Agenda IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
- Agenda V : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- Agenda VI : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- Agenda VII : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dari ketujuh agenda tersebut, pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terfokus pada agenda ke VII yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan

melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Penegakan pilar demokrasi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Hal ini tertuang di dalam Renstra Kemendagri 2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, penegakan pilar demokrasi difokuskan kepada:

1. Jumlah paket revisi undang-undang bidang politik, khususnya revisi terbatas terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 pengganti UU Nomor 22 Tahun 2007 menjadi tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;
3. Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil;
4. Indeks Kebebasan Sipil;
5. Indeks Hak-Hak Politik;
6. Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;
7. Persentase forum dialog publik yang efektif; serta
8. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI).

Kebijakan yang telah digariskan Menteri Dalam Negeri RI melalui Renstra Kemendagri tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis oleh Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karenanya, untuk melihat arah kebijakan nasional pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan telaahan kebijakan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri RI dan kebijakan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan bermaksud untuk melakukan analisa kemampuan Badan Kesbangpol Kota Bekasi di dalam menjawab tantangan isu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkembang di tataran pusat maupun provinsi. Telaahan ini juga disertai analisa faktor penghambat dan pendorong pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi dihubungkan dengan kebijakan prioritas yang dikeluarkan Ditjen Kesbangpol dan Badan Kesbangpol Prov. Jawa Barat. Telaahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Dalam Pelayanan

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan			
	1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> Data base keberadaan/domisili organisasi kemasyarakatan di Kota Bekasi belum terkonsolidasi dengan baik; Anggota-anggota organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tidak melakukan transfer pengetahuan kepada anggotanya 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota organisasi kemasyarakatan kurang disiplin di dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi.
	Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Politik Dalam Negeri			
	2) Persentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu	Kurangnya pendidikan dasar bagi aparatur Kesbangpol terkait metode penyusunan laporan pemantauan perkembangan politik yang sedang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya penjelasan mengenai indikator-indikator politik yang harus dilaporkan dari objek pantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk memberikan laporan pantauan terkait perkembangan politik yang terjadi di Kota Bekasi
	3) Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Partai Politik terkait informasi tata cara pemberian Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan Partai Politik di dalam menyelesaikan SPJ Bantuan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang berhak menerima Bantuan Keuangan
	Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Kewaspadaan Nasional			
	4) Jumlah Pemantauan Situasi Daerah	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam melakukan pemantauan situasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana serta aparatur di dalam menunjang kegiatan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan pemantauan terkait situasi dan eskalasi yang terjadi di daerah
	5) Jumlah aparatur Pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan bidang	Minimnya aparatur Kesbangpol Kota Bekasi yang mendapatkan Diklat	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya anggaran yang mendukung adanya Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	Kewaspadaan Nasional	mengenai Kewaspadaan Nasional	Kewaspadaan Nasional	pembinaan kepada aparaturnya terkait Kewaspadaan Nasional
Indikator Kinerja Ditjen Kesbangpol Kemendagri: Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
	1) Jumlah kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Belum tersedianya ketentuan/ metode baku terkait materi dan pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam membangun wawasan kebangsaan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan masyarakat di dalam mengkaji wawasan kebangsaan dan ideologi Negara, terutama dari kalangan pemula 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjalin kerjasama yang intensif dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka membangun ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat
	2) Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah	Belum tersedianya materi/ bahan ajar baku yang membahas nilai-nilai kebangsaan bagi pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya keinginan pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintah di dalam mengkaji nilai-nilai kebangsaan demi terciptanya wawasan kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk melakukan penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparaturnya pemerintahan
2	Indikator Kinerja Bakesbangpol Prov. Jawa Barat: Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat			
	Sasaran Jangka Menengah: 3) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;	Adanya instansi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama di dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi tidak memiliki payung hukum untuk melakukan sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi memiliki tanggung jawab berdasarkan tupoksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu
	4) Tingkat Penyelenggaraan Pendidikan Politik;	Adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang dari sebagian aktifis organisasi yang berada di Kota Bekasi di dalam melakukan pemaknaan proses politik	<ul style="list-style-type: none"> Data domisili dari organisasi kemasyarakatan atau perwakilan kelompok lainnya sering berubah tanpa ada pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk memperkuat kelembagaan demokrasi yang ada di Kota Bekasi serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat Kota Bekasi
	5) Tingkat Peran Serta Masyarakat Madani (Civil	Belum ada payung hukum yang secara terperinci mengatur	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat oknum dari Orkemas atau aktifis di Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai

No	Indikator Kinerja dan Sasaran Jangka Menengah Kemendagri dan Bakesbangpol Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Bakesbangpol Kota Bekasi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
	Society) dalam Pembangunan Politik;	keterlibatan masyarakat beserta batasannya di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi	Bekasi yang menggunakan dalil peran serta masyarakat atau keterbukaan publik melakukan tindakan penyidikan yang bukan wewenang dari organisasi tersebut	kewajiban untuk memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam Pembangunan Politik di Kota Bekasi dengan cara menanamkan nilai-nilai politik yang santun dan beretika
	6)Tingkat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum menyediakan modul/ garis-garis besar Wawasan Kebangsaan terkait kondisi Indonesia saat ini	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya keinginan dari masyarakat untuk memahami Wawasan Kebangsaan, terutama dari kalangan remaja/ pemula 	<ul style="list-style-type: none"> Kesbangpol Kota Bekasi, berdasarkan tupoksi mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai dan ideologi Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat pemula/remaja

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol dalam periode 2024-2026 harus disesuaikan dengan misi dan program prioritas yang dimaksud sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun tujuan Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Merawat Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman;

Adapun sasaran Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah:

- 1) Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
- 2) Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Dari sasaran tersebut kemudian ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja tujuan.

Sasaran-sasaran yang ada kemudian dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program anggaran/ kegiatan. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan beberapa program, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini diukur dengan menggunakan Persentase Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Persentase Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah;

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini diukur dengan menggunakan indikator Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan prioritas arah pembangunan daerah, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. Pada tahun 2024 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan serta penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menyebabkan konflik SARA di masyarakat. Badan Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi

serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga kantrantibmas dan menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan kondisifitas wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman secara rutin.

Dalam mendukung upaya yang telah disebutkan di atas, Badan Kesbangpol menyiapkan pembiayaan upaya tersebut dalam wujud rincian program dan kegiatan Badan Kesbangpol yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Rincian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung Non Urusan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan yang mencakup (Renstra, Proker, Renja, RKT, LKPJ dan LKIP). Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.090.250.000. Dengan target indikator sebanyak 1026 Orang/bulan, adapun keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran gaji, tunjangan dan premi BPJS ASN.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 16 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana apratur sebanyak 2 Paket untuk 52 Orang. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal aparatur sebanyak 12 orang selama 12 bulan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 264.927.780. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bakesbangpol dengan target sebanyak 52 Orang. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas dan sumber daya aparatur. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya layanan alat tulis kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan alat tulis kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terlaksananya

layanan cetakan dan penggandaan sebanyak 12 Paket. Hasil yang didapat adalah tersedianya layanan cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target indikator sebanyak 2 Dokumen. Hasil yang didapat adalah tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah serta makanan dan minuman Rapat sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terlaksananya aktifitas kantor selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah penataan arsip pada Badan Kesbangpol sebanyak 12 Dokumen. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 514.598.960. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk dengan target capaian sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 377.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak (22 unit) 9 unit roda empat dan 13 unit roda dua. Hasil yang didapat adalah tersedianya pemeliharaan kendaran dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 Unit. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

2. Belanja Langsung Urusan SKPD

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dan target dari Sub Kegiatan ini yaitu 1620 Orang.
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.290.812.860, Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan

dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam Siliwangi.

- Pembinaan penguatan ideologi pancasila di kalangan remaja di Kota Bekasi.
 - Sosialisasi Pemantapan ideologi bangsa dan nilai-nilai pancasila dengan sasaran peserta berasal dari berbagai elemen kalangan masyarakat seperti, pelajar, lembaga pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Kepemudaan, Ormas/LSM.
 - Fasilitasi Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA).
- Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselesaikannya permasalahan wawasan kebangsaan di Kota Bekasi.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 79.407.875.000
Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi sejumlah 8 Partai Politik.
- Fasilitasi lembaga yang mendapat Bantuan Dana Hibah sebanyak 4 Lembaga yaitu KPUD Kota Bekasi dan BAWASLU Kota Bekasi, Polresta Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507/Bekasi. Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi dan terfasilitasi operasional lembaga pemerintah (KPU, BAWASLU, Polresta Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507/Bekasi) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2024 dan berdasarkan kepada pengajuan dana operasional lembaga tersebut Bakesbangpol memfasilitasi melalui sub kegiatan ini.

- **Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 2.400 Orang.
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik di Kota Bekasi.
 - Pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan

pendidikan politik secara *on the spot* di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat.

- Pembinaan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi pileg dan pilpres. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder perangkat daerah terkait dalam rangka penguatan fungsi penyelenggaraan pemilu Tahun 2024.
- Fasilitasi Desk Pemilu Tahun 2024, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam fungsi memfasilitasi proses Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka perlu dibentuk tim Desk Pemilu oleh karenanya melalui sub kegiatan ini juga akan mengampu pelaksanaan Tim Desk yang terdiri dari beberapa stakeholder terkait.
- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 34.156.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemantauan situasi politik di daerah sebagai bentuk tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan maksud dan tujuan menjaga kondusifitas pra pemilu dan pilkada pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- **Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 41 Dokumen.
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.595.411.700. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak 41 Ormas/LSM di Kota Bekasi.
- **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 300 Orang.
 - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 745.000.000. Dilihat dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang begitu kompleks dari berbagai bidang kegiatan sudah kewajiban pemerintah daerah melalui Bakesbangpol memfasilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil yang didapat adalah terciptanya Tertib Administrasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 1.700 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan pertama dengan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bekerja sama dengan unsur stakeholder terkait yang ada di setiap wilayah, dan pelaksanaan kedua dengan memberikan Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) kepada masyarakat Kota Bekasi, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi narkoba di Kota Bekasi. Adapun hasil yang didapat adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba.
 - Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama. Adapun hasil yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 400 Orang.

- ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 845.200. 000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi orang asing di Kota Bekasi.
- Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan Kelurahan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi.
- Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota dan Kecamatan. FKDM merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2019, sebagai salah satu lembaga yang bernaung di Bakesbangpol, melalui adanya pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya penguatan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi FKDM sesuai dengan pedoman peranan yang ada di dalam amanah Permendagri tersebut. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai lembaga yang di bentuk pemerintah yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.
- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Laporan.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 537.200.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan dan terlaksananya kewaspadaan dini daerah di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dan pemetaan keamanan wilayah Kota Bekasi.

- **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.** Dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Output dari Sub Kegiatan ini yaitu 12 Dokumen.

✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.955.000.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota selama 12 Bulan. Sebagaimana yang diamanahkan pada oleh Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka dengan mengacu ketentuan tersebut Badan Kesbangpol memfasilitasi melalui sub kegiatan ini.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA-PD berpedoman pada RENSTRA Badan Kesbangpol Kota Bekasi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RENJA-PD bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. RENJA-PD yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini dengan program dan kegiatan serta pagu indikatif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
8																	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		144.728.194.300	108.398.244.300							64.108.599.380					
8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	11.481.953.740	12.232.588.740					100 %	12.318.229.520			
8	1	1	2,0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17.000.000	17.000.000					100 %	20.000.000			
8	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17.000.000	17.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	1 Laporan	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.874.902.000	9.106.062.000					100 %	9.093.250.000		
8	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1026 Ora ng/bulan	8.866.902.000	9.098.062.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	1026 Ora ng/bulan	9.090.250.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	18 Lapora n	8.000.000	8.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	16 Lapora n	3.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %									100 %					
8	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	330.000.000	484.927.780					100 %	494.927.780		
8	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000	200.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	2 Paket	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30.000.000	20.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Orang	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undang	52 Orang	150.000.000	264.927.780	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	52 Orang	264.927.780	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								100 %		
8	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	875.000.000	947.781.750						100 %	972.781.750	
8	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350.000.000	350.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Paket	350.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000	75.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Paket	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	75.000.000	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Dokumen	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	422.781.750	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	422.781.750	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75.000.000	50.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	220.000.000	510.218.250						100 %	510.218.250	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
								Nasional	Daerah					
8 01 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	220.000.000	510.218.250	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	34 Unit	510.218.250	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	550.051.740	514.598.960						100 %	550.051.740		
8 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.051.740	514.598.960	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	514.598.960	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %								100 %			
8 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	615.000.000	652.000.000						100 %	677.000.000		
8 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	340.000.000	377.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	22 Unit	377.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75.000.000	75.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	25 Unit	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	25 Unit	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 1 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	2.290.812.860	2.290.812.860						100 %	2.390.812.860		
8 1 2 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1620 Orang	2.290.812.860	2.290.812.860						1620 Orang	2.390.812.860		
8 1 2 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1620 Orang	2.290.812.860	2.290.812.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar dan Masyarakat	1620 Orang	2.390.812.860	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 1 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100%	118.822.616.000	80.942.031.000						100%	37.949.357.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
		PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
8	1	3	2,0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Dokumen	117.288.460.000	79.407.875.000				12 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
					Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2400 Orang	1.500.000.000	1.500.000.000				2400 Orang	750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	34.156.000	34.156.000				12 Laporan	34.156.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
8	1	3	2,01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	117.288.460.000	79.407.875.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	2400 Orang	1.500.000.000	1.500.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	2400 Orang	750.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
8	1	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	34.156.000	34.156.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	12 Lapora n	34.156.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.595.411.700	8.595.411.700						100 %	8.955.000.000	
8	1	4	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41 Dokumen	8.595.411.700	8.595.411.700						41 Dokumen	8.955.000.000	
						Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang								300 Orang		
8	1	4	2,01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	7.850.411.700	7.850.411.700	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/L embaga Swadaya Masyarakat	41 Dokumen	9.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	745.000.000	745.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/L embaga Swadaya Masyarakat	300 Ora ng	800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000						100 %	1.000.000.000	
8	1	5	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	1700 Ora ng	1.000.000.000	1.000.000.000						1700 Ora ng	1.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
8	1	5	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1700 Orang	1.000.000.000	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait	1700 Orang	1.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	2.537.400.000	3.337.400.000						100 %	1.495.200.000	
8	1	6	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	2.537.400.000	3.337.400.000						400 Orang	3.337.400.000	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan													
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen													
8	1	6	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	400 Orang	845.200.000	845.200.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	400 Orang	845.200.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2024	Pagu Indikatif (Rancangan KUA dan PPAS)	Pagu Indikatif (Hasil Evaluasi Gubernur)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
8	1	6	2,01	5	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537.200.000	537.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	12 Laporan	537.200.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.155.000.000	1.955.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	12 Dokumen	1.955.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL							144.728.194.300	108.398.244.300								60.796.626.740	

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Salah satu konsentrasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun 2024, terkait dengan adanya Surat edaran Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam point C Nomor 2 (a) dan (b) yang berisikan tentang prosentase penganggaran Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Dengan dasar Surat Edaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyesuaikan NPHD kepada Lembaga yang menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, sebagaimana berikut :

- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nomor : 774/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 593/PR.08-PKS/3275/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.496.000.000,-
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.000.000,-Jumlah Total Dana KPU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000.000,-
- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi, Nomor : 775/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 79/HK.02/K.JB-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.506.585.000,-
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.728.388.000,-Jumlah Total Dana BAWASLU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.234.973.000,-

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjarangan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2024, Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi, 2023
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BEKASI


NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE
 Pembina Tk. I / (IV.b)
 NIP. 19740708 200212 1 007

**USULAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF (RANCANGAN KUA DAN PPAS)	PAGU INDIKATIF (HASIL EVALUASI GUBERNUR)
1	BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)	Rp. 11,481,953,740,-	Rp. 12.232.588.740,-
2	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)	RP. 8,107,368,860,-	RP. 8,907,244,300,-
3	BELANJA HIBAH (HIBAH BANTUAN PARTAI POLITIK, HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN HIBAH FASILITASI LEMBAGA PEMERINTAH)	Rp. 125,138,871,700,-	Rp. 87,258,286,700,-
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 144,728,194,300,-	Rp. 108.398.244.300,-